

# SITUASI POLITIK DAN KEAMANAN 2019

## PROVINSI BANTEN



# SITUASI POLITIK DAN KEAMANAN 2019

PROVINSI BANTEN



# **Situasi Politik dan Keamanan Provinsi Banten 2019**

**ISSN** : -  
**No. Publikasi** : 36520.2008  
**Katalog** : 4601001.36

**Ukuran Buku** : 18,2 cm x 25,7 cm  
**Jumlah Halaman** : viii + 48 Halaman

**Naskah:**  
Bidang Statistik Sosial

**Penyunting:**  
Bidang Statistik Sosial

**Desain Kover oleh:**  
Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

**Diterbitkan oleh:**  
Badan Pusat Statistik Provinsi Banten

**Dicetak oleh:**  
CV. Dharmaputra

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,  
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan  
komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

## KATA PENGANTAR

Era reformasi sebagai titik tolak kebangkitan demokrasi memberikan perubahan nyata di seluruh bidang kehidupan baik di tingkat nasional maupun daerah, termasuk Provinsi Banten. Momentum demokratisasi yang terjadi pada tahun 1998 mendorong terjadinya perubahan riil terutama dalam kehidupan politik dan keamanan di Indonesia. Untuk melihat seberapa jauh arah permasalahan mengenai situasi politik dan keamanan, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mencoba menjawab dengan menyusun publikasi **“Situasi Politik dan Keamanan Provinsi Banten 2019”**.

Data yang digunakan dalam publikasi ini berasal dari data BPS dan dinas/instansi terkait dengan cara kompilasi hasil registrasi/catatan. Sumber data BPS berasal dari data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2019 Provinsi Banten sedangkan sumber data dinas/instansi terkait berasal dari Polres/Polresta/Polda, KPU, Bappeda dan DPRD Kabupaten/Kota/Provinsi.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan publikasi ini. Kritik dan saran yang diberikan sangat kami hargai untuk perbaikan di masa mendatang.

Serang, November 2020

Kepala,



**Ir. Adhi Wiriana, M.Si**



## DAFTAR ISI

Pengantar .....	iii
Daftar isi .....	v
Daftar Tabel .....	vi
Daftar Gambar .....	viii
<b>Bab I. Pendahuluan</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	3
1.3. Ruang Lingkup .....	3
1.4. Sistematika Penyajian .....	4
<b>Bab II. Statistik Politik Provinsi Banten 2019</b> .....	5
2.1. Konsep Definisi .....	5
2.2. Situasi Politik Provinsi Banten 2019 .....	7
<b>Bab III. Statistik Keamanan Provinsi Banten 2019</b> .....	11
3.1. Konsep Definisi .....	11
3.2. Situasi Politik Provinsi Banten 2019 .....	12
<b>Bab IV. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)</b> .....	17
4.1. Konsep Definisi .....	17
4.2. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten 2019 .....	20
<b>Lampiran</b> .....	25

## DAFTAR TABEL

1.1. Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten menurut Masa Pemerintahan .....	8
2.1. Jumlah Anggota DPRD Provinsi Banten menurut Asal Partai dan Jenis Kelamin Tahun 2019 .....	27
2.2. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang menurut Asal Partai dan Jenis Kelamin Tahun 2019 .....	28
2.3. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Lebak menurut Asal Partai dan Jenis Kelamin Tahun 2019 .....	29
2.4. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Tangerang menurut Asal Partai dan Jenis Kelamin Tahun 2019 .....	30
2.5. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Serang menurut Asal Partai dan Jenis Kelamin Tahun 2019 .....	31
2.6. Jumlah Anggota DPRD Kota Tangerang menurut Asal Partai dan Jenis Kelamin Tahun 2019 .....	32
2.7. Jumlah Anggota DPRD Kota Cilegon menurut Asal Partai dan Jenis Kelamin Tahun 2019 .....	33
2.8. Jumlah Anggota DPRD Kota Serang menurut Asal Partai dan Jenis Kelamin Tahun 2019 .....	34
2.9. Jumlah Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan menurut Asal Partai dan Jenis Kelamin Tahun 2019 .....	35
2.10. Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan DPRD Tahun 2019 .....	36

2.11. Jumlah Organisasi Massa yang Terdaftar Tahun 2019.....	37
3.1. Jumlah Kantor Polisi menurut Kabupaten/Kota dan Wilayah Kerja di Provinsi Banten Tahun 2019 .....	38
3.2. Jumlah Polisi dan Rasio Penduduk per Polisi di Provinsi Banten Tahun 2019 .....	39
3.3. Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan ( <i>Crime Total</i> ) dan Tindak Pidana yang Diselesaikan ( <i>Crime Cleared</i> ) di Provinsi Banten Tahun 2019.....	40
3.4. Persentase Penyelesaian Tindak Pidana ( <i>Clearance Rate</i> ) di Provinsi Banten Tahun 2019 .....	41
3.5. Jumlah Pengelompokan Jenis Tindak Pidana terhadap Fisik Manusia di Provinsi Banten Tahun 2019.....	42
3.6. Pengelompokan Jenis Tindak Pidana terhadap Hak Milik (Barang) di Provinsi Banten Tahun 2019.....	43
3.7. Jenis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Banten Tahun 2019.....	44
4.1. Perkembangan Indeks Variabel IDI Banten, 2018-2019.....	45
4.2. Perkembangan Skor Indikator IDI Banten, 2018-2019.....	46
4.8. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Berdasarkan Aspek dan Provinsi, 2018-2019.....	48



## DAFTAR GAMBAR

2.1. Anggota DPRD Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Banten, 2019 .....	10
3.1. Rasio Penduduk per Polisi di Provinsi Banten, 2019 .....	13
3.2. Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan ( <i>Crime Total</i> ) dan Tindak Pidana yang Diselesaikan ( <i>Crime Cleared</i> ) di Provinsi Banten, 2019 .....	14
3.3. Resiko Penduduk Menjadi Korban Tindak Kejahatan ( <i>Crime Rate</i> ) di Provinsi Banten, .....	16
4.1. Perkembangan IDI Banten, 2009-2019 .....	20
4.2. Perkembangan Indeks Aspek IDI Banten, 2009-2019 .....	21
4.3. Perkembangan Indeks Variabel IDI Banten, 2018-2019 .....	23

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Geliat politik di Indonesia kini semakin memanas. Era reformasi sebagai titik tolak kebangkitan demokrasi memberikan perubahan di seluruh bidang kehidupan baik di tingkat nasional maupun daerah termasuk Provinsi Banten. Hal ini tercermin dari pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan negara, pemberian kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi serta dalam kinerja lembaga-lembaga pemerintahan.

Momentum demokratisasi yang terjadi pada tahun 1998 mendorong terjadinya perubahan riil dalam kehidupan politik di Indonesia. Perubahan yang paling dominan adalah tuntutan adanya pemencaran kekuasaan yang sebelumnya tersentral pada presiden. Desentralisasi yang kemudian dikenal dengan otonomi daerah mulai diberlakukan secara luas, nyata dan bertanggung jawab melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah berlangsung selama 10 tahun lebih, menciptakan keragaman berbagai aspek regional, salah satunya adalah keragaman pelaksanaan demokrasi yang dalam beberapa hal dapat mengarah pada menurunnya nilai-nilai demokrasi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Bappenas sebagai badan perencana mempunyai tugas untuk membuat perencanaan pembangunan dengan memperkuat upaya konsolidasi

demokrasi dan memperdalam budaya demokrasi. Karena itu, Bappenas dan UNDP bersama-sama dengan Kemendagri, BPS, pemerintahan provinsi dan organisasi masyarakat sipil serta akademisi seluruh Indonesia berupaya menyusun suatu alat untuk mengukur kinerja demokrasi hingga level provinsi yang disebut dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

Di sisi lain, tujuan kesejahteraan mengisyaratkan pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan publik terhadap masyarakat lokal secara efektif, efisien dan ekonomis. Pelayanan publik ini mencakup kebutuhan fundamental setiap manusia yang terdiri dari kebutuhan biologis seperti makan, minum serta tidur, dan kebutuhan sosial, seperti status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri dan rasa aman.

Rasa aman ditandai dengan hidup yang tidak tertekan atau bahkan merasa bahwa hidup ini ada gunanya. Selain merupakan kebutuhan sosial, rasa aman (*secure*) juga merupakan salah satu hak asasi yang harus diperoleh atau dinikmati setiap orang. Rasa aman merupakan salah satu hak asasi setiap orang. Hal itu sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi "... pemerintah dan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...".

Kewajiban ini secara eksplisit juga tertuang dalam Pasal 30 ayat (4), amandemen kedua UUD 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Terciptanya dan terpenuhinya rasa aman pada masyarakat akan membangun suasana

yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas termasuk aktifitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Untuk melihat seberapa jauh arah permasalahan mengenai kondisi politik dan keamanan, tentunya diperlukan data-data penunjang yang jelas, lengkap dan *up to date*. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten menyajikan gambaran dimaksud dengan menyusun publikasi **“Situasi Politik dan Keamanan Provinsi Banten 2019”**.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Secara umum, tujuan penyusunan publikasi ini adalah memberikan gambaran makro mengenai situasi dan kondisi keamanan dan politik masyarakat. Secara khusus, penyusunan publikasi ini ditujukan untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai karakteristik kejadian tindak kriminalitas, konflik massal dan peran serta masyarakat dan DPRD dalam panggung perpolitikan tingkat kabupaten/kota dan provinsi serta perkembangan tingkat demokrasi di Provinsi Banten yang diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Ketersediaan data ini sangat bermanfaat sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

## **1.3 Ruang Lingkup**

Publikasi Situasi Politik dan Keamanan Provinsi Banten 2019 menyajikan gambaran politik, kejadian tindak kejahatan/kriminalitas dan

kejadian konflik massal yang terjadi di wilayah kabupaten/kota di Provinsi Banten. Data yang disajikan adalah keadaan tahun 2019 yang bersumber dari dinas/instansi terkait (Polres/Polda, Sekretaris Dewan, Biro Hukum dan Kesbangpol) dan data BPS.

#### **1.4 Sistematika Penyajian**

Publikasi ini secara keseluruhan disajikan dalam 6 bagian (bab) yang disusun secara sistematis. Bab I berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang dan tujuan penyusunan publikasi, sedangkan Bab II, III dan IV berturut-turut menyajikan pembahasan tentang statistik politik, statistik keamanan dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten 2019. Bab terakhir, sebagai bab penutup berisi lampiran data-data yang diperoleh dari dinas terkait.

## BAB II. STATISTIK POLITIK PROVINSI BANTEN 2019

### 2.1 Konsep Definisi

Konsep dan definisi serta terminologi berbagai variabel merujuk pada konsep dan definisi serta terminologi yang digunakan oleh sumber data.

**Pemilihan Umum**, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 22/2007). Terdapat tiga Pemilu di Indonesia yaitu Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah.

**Warga Negara Indonesia** adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara (UU No. 10/2008).

**Penduduk** adalah warga negara Indonesia atau warga negara asing yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia.

**Pemilih** (Penduduk yang terdaftar dalam Pemilu) adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan lebih atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin (UU No. 10/2008).

**Surat Suara dinyatakan Sah** berdasarkan Peraturan KPU No. 72 Tahun 2009, apabila:

- Surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS;
- Surat suara yang dicoblos adalah surat yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota;
- Surat suara tidak rusak;
- Surat suara tidak terdapat tulisan atau catatan lain;
- Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kolom yang memuat satu pasangan calon.

Jika melanggar salah satu aturan tersebut, maka surat suara dinyatakan tidak sah.

**Tidak Menggunakan Hak Pilih (Golput)** adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Angka golput adalah persentase pemilih yang tidak menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang berhak memilih.

**Partai Politik** adalah organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan politik dengan cara mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik atau perebutan kekuasaan dan atau jabatan publik.

**Organisasi Kemasyarakatan** yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

**Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)** adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

## **2.2 Situasi Politik Provinsi Banten 2019**

Sejak Indonesia merdeka, hampir seluruh periode pemerintahan dikelola dengan sistem ketatanegaraan yang terpusat. Pemerintah daerah berperan sebagai cabang struktural yang melaksanakan sebagian besar agenda-agenda yang disusun oleh pemerintah pusat. Dalam perkembangannya muncul pemikiran untuk memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Lebih lagi jika mengingat kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan. Pada tahun 1999 kesadaran tersebut memunculkan keputusan untuk melakukan desentralisasi. Desentralisasi dalam wujud otonomi daerah dianggap dapat menjawab salah satu prasyarat penting dalam demokrasi, yaitu adanya partisipasi rakyat.

Provinsi Banten merupakan daerah otonom yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000. Sebelumnya Banten merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat. Pada Orde Reformasi, perjuangan masyarakat Banten semakin gigih karena mulai terasa semilirnya angin demokrasi dan isu tentang otonomi daerah. Pada 18 Juli 1999 diadakan Deklarasi Rakyat Banten di Alun-Alun Serang yang kemudian Badan Pekerja Komite Panitia Provinsi Banten menyusun Pedoman Dasar serta Rencana Kerja dan Rekomendasi



Komite Pembentukan Provinsi Banten. Rapat paripurna DPR RI pada tanggal 4 Oktober 2000 yang mengesahkan RUU Provinsi Banten menjadi Undang-undang ditetapkan sebagai hari jadi terbentuknya Provinsi Banten. Pada tanggal 18 November 2000 dilakukan peresmian Provinsi Banten dan pelantikan penjabat Gubernur H. Hakamudin Djamal untuk menjalankan pemerintahan Provinsi Banten sampai terpilihnya gubernur definitif. Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten terpilih seperti terlihat pada Tabel 1.1.

**Tabel 1.1. Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten menurut Masa Pemerintahan**

No	Gubernur	Wakil Gubernur	Masa Pemerintahan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Hakamudin Djamal	-	2000 – 2002
2	Djoko Munandar	Ratu Atut Chosiyah	2002 – 2005
3	Ratu Atut Chosiyah (Plt)	-	2005 – 2007
4	Ratu Atut Chosiyah	Mohammad Masduki	2007 – 2012
5	Ratu Atut Chosiyah	Rano Karno	2012 – 2014
6	Rano Karno (Plt)	-	2014 – 2015
7	Rano Karno	-	2015 – 2017
8	Nata Irawan	-	Januari – Mei 2017
8	Wahidin Halim	Andika Hazrumy	2017 sd sekarang

*Sumber: KPUJ Kabupaten/Kota dan Provinsi*

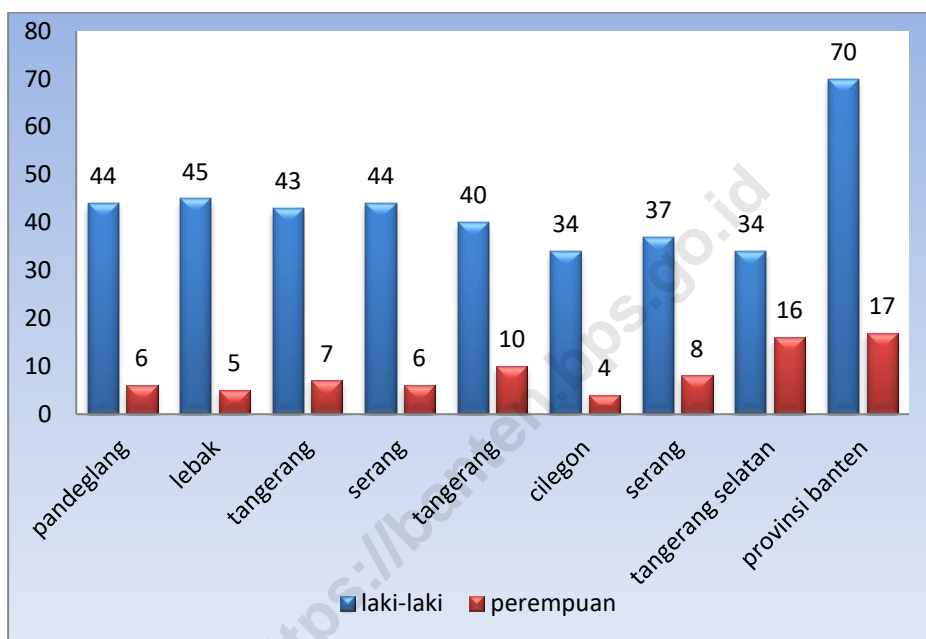
Dalam hal emansipasi wanita, Pemerintah Provinsi Banten tidak perlu diragukan lagi. Sebelumnya Gubernur Banten dijabat oleh seorang srikandi selama tiga periode berturut-turut, sekarang empat pimpinan daerah kabupaten/kota juga dipimpin oleh para srikandi, yaitu Irna Narulita Dimiyati (Kabupaten Pandeglang), Iti Octavia Jayabaya (Kabupaten Lebak), Ratu Tatu Chasanah (Bupati Serang) dan Airin Rachmi Diany (Walikota Tangerang Selatan).

Gambaran tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada dapat menjadi tolak ukur seberapa jauh iklim demokrasi sudah diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur terakhir tanggal 15 Februari 2017 tingkat *voters turnout* di Provinsi Banten hanya sebesar 61,19 persen. Jadi masih ada sebesar 38,81 persen atau sebanyak 3.001.949 penduduk Banten yang tidak menggunakan hak pilihnya walaupun sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dan organisasi perempuan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, tetapi hasilnya belum sesuai yang diharapkan seperti tercantum pada UU Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Proporsi anggota legislatif perempuan yang terpilih gagal mencapai *affirmative action* sebesar 30 persen pada Pemilu 2019. Kondisi yang sama terjadi pula di Banten. Keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Banten pada tahun 2019 hanya sebesar 17,65 persen. Kota Tangerang Selatan memberikan nilai tertinggi dalam keterwakilan perempuan di parlemen yaitu sebanyak 16 perempuan dari total 50 anggota atau sebesar 32,00

persen. Sedangkan anggota dewan Kabupaten Lebak berjenis kelamin perempuan hanya sebanyak 5 dari 50 anggota (10,00 persen).

**Gambar 2.1. Anggota DPRD Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Banten, 2019**



Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi

## BAB III. STATISTIK KEAMANAN PROVINSI BANTEN 2019

### 3.1 Konsep Definisi

Konsep dan definisi serta terminologi berbagai variabel merujuk pada konsep dan definisi serta terminologi yang digunakan oleh sumber data.

**Peristiwa Kejahatan (Kriminalitas)/Pelanggaran** merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.

**Tindak Pidana** adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Pelakunya dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.

**Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan (*Crime Total*)** adalah jumlah peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada pihak kepolisian, atau peristiwa yang pelakunya tertangkap tangan oleh polisi. Indikator ini memberikan gambaran jumlah tindak pidana yang terjadi pada kurun waktu tertentu dengan tidak menutup kemungkinan masih adanya kasus yang tidak tercatat (*dark number*). Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindaklanjuti oleh kepolisian jika dikategorikan memiliki cukup bukti.

**Jumlah Tindak Pidana yang Diselesaikan oleh Kepolisian (*Crime Cleared*)** adalah peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa; dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang; peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *plichtmatigheid*; peristiwa yang tidak termasuk kompetensi kepolisian; peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia

dan peristiwa yang telah kadaluwarsa.

**Persentase Tindak Pidana yang Diselesaikan (*Clearance Rate*)** adalah persentase tindak pidana yang telah diselesaikan terhadap tindak pidana yang dilaporkan pada satu tahun tertentu.

**Resiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan (*Crime Rate*)** adalah angka yang mengindikasikan peluang penduduk beresiko terkena tindak pidana per seratus ribu penduduk. Indikator ini mengindikasikan resiko penduduk terkena tindak pidana pada suatu waktu tertentu. Perbandingan antar waktu menunjukkan perkembangan tingkat keamanan penduduk..

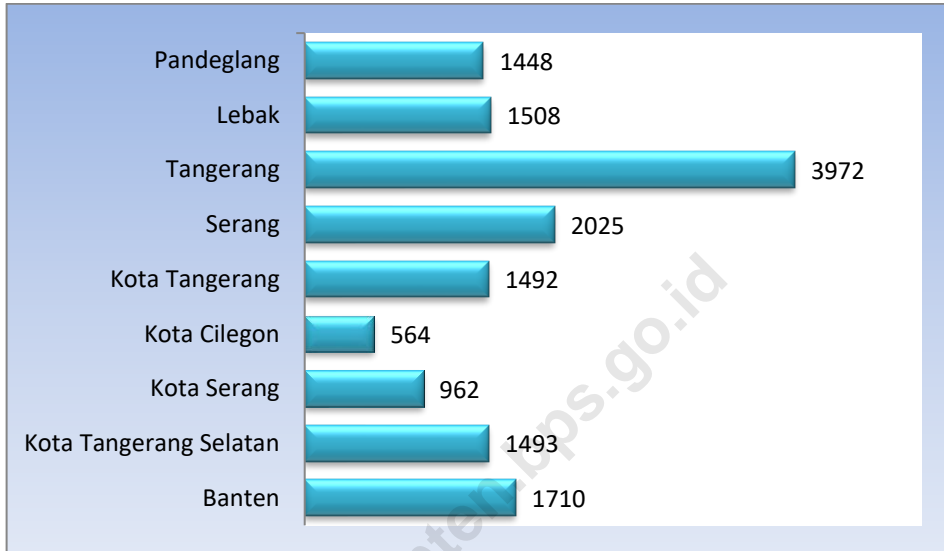
### **3.2 Situasi Keamanan Provinsi Banten 2019**

Aman atau tidaknya suatu wilayah tak lepas dari fasilitas keamanan yang tersedia di wilayah tersebut. Dalam upaya penanggulangan masalah keamanan di Banten didukung oleh berbagai prasarana keamanan antara lain 71 pos polisi, 114 polsek/polsekta, 8 polres/polresta, serta 1 polda.

Polisi merupakan satuan organisasi keamanan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Rasio polisi adalah jumlah polisi dibandingkan dengan jumlah penduduk suatu wilayah. Menurut PBB rasio polisi yang ideal adalah 1 : 400. Besar kecilnya rasio polisi menentukan efektivitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Secara logika, semakin kecil rasio polisi semakin efektif pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Sebaliknya semakin besar rasio polisi akan menyebabkan pengaduan masyarakat tidak tertangani dengan baik, penyidikan berlarut-larut, intensitas patroli rendah, atau kehadiran

polisi di tempat kejadian perkara (*quick response*) tidak tepat waktu.

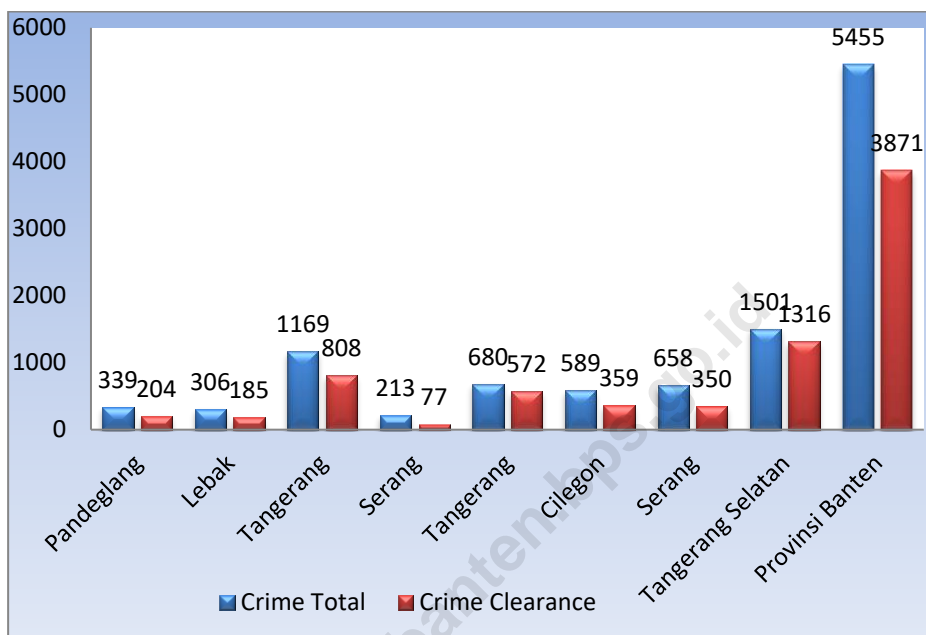
**Gambar 3.1 Rasio Penduduk per Polisi di Provinsi Banten, 2019**



Sumber : Polres Kab/Kota dan Polda Banten

Pada tahun 2019 rasio penduduk per polisi di Banten sebesar 1.710, artinya setiap 1 polisi harus melayani 1.710 penduduk. Bila dilihat per kabupaten/kota, rasio penduduk per polisi terbesar berada di Kabupaten Tangerang dengan angka 3.972, sedangkan rasio terkecil berada di Kota Cilegon yaitu 564. Dengan kata lain polisi di Kabupaten Tangerang mempunyai beban pelayanan yang cukup berat yaitu setiap seorang polisi harus melayani sekitar 3.972 penduduk, sedangkan beban pelayanan terkecil adalah polisi di Kota Cilegon, di mana setiap 1 orang polisi melayani 564 penduduk saja. Untuk mencapai kondisi ideal, satu orang polisi bertanggung jawab pada 400 penduduk, dibutuhkan banyak personil polisi di wilayah Provinsi Banten.

**Gambar 3.2 Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan (*Crime Total*) dan Tindak Pidana yang Diselesaikan (*Crime Cleared*) di Provinsi Banten, 2019**



Sumber : Polres Kab/Kota dan Polda Banten

Pada tahun 2019, pihak kepolisian mencatat terdapat 5.455 kasus tindak kejahatan yang dilaporkan masyarakat ke Polda Banten. Dari sejumlah kasus tersebut, baru 3.871 kasus tindak kejahatan yang sudah diselesaikan, atau dengan kata lain persentase penyelesaian tindak pidana (*clearance rate*) di Polda Banten adalah sebesar 70,96 persen.

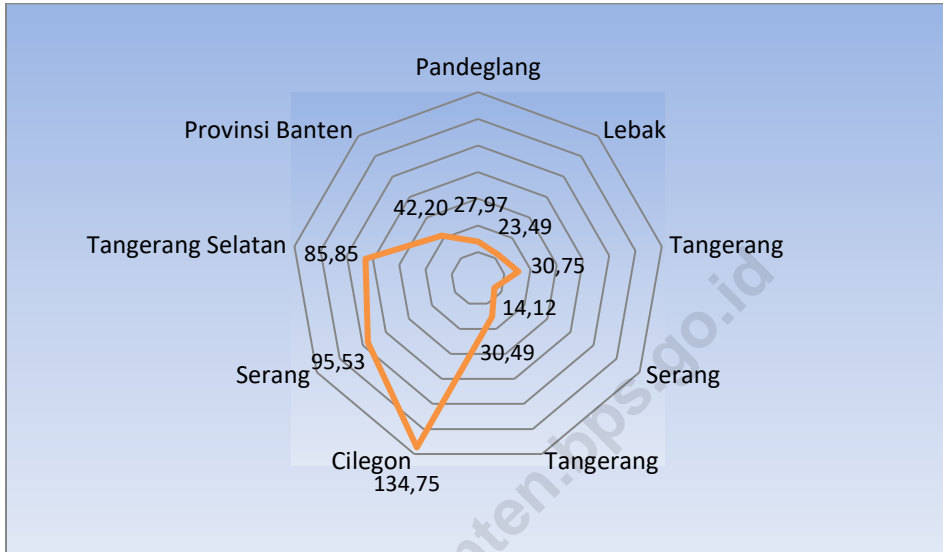
Tindak kejahatan pada tahun 2019 paling banyak terjadi di Kota Tangerang Selatan yakni sebesar 1.501 kasus, disusul oleh Kabupaten Tangerang (1.169 kasus) dan Kota Tangerang (680 kasus). Kabupaten Serang merupakan wilayah teraman dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten.

Kota Tangerang Selatan mempunyai *clearance rate* yang paling tinggi yaitu sebesar 87,67 persen. Dari sejumlah 1.501 kasus yang dilaporkan masyarakat ke Polres Kota Tangerang Selatan pada tahun 2019, 1.316 kasus di antaranya dapat diselesaikan di tahun yang sama. Sementara *clearance rate* terendah berada di Kabupaten Serang yaitu sebesar 36,15 persen (dari 213 kasus yang dilaporkan hanya 77 kasus yang diselesaikan).

Untuk melihat berapa resiko penduduk menjadi korban tindak kejahatan dapat diukur dengan indikator *crime rate*. Pada tahun 2019, dari setiap 100.000 penduduk di Banten sebanyak 42 orang beresiko terkena tindak kejahatan. Penduduk di Kota Cilegon paling beresiko menjadi korban kejahatan, yaitu sebanyak 134 orang dari setiap 100.000 penduduk. Sementara hanya 14 orang yang beresiko menjadi korban tindak kejahatan dari setiap 100.000 penduduk Kota Serang.



**Gambar 3.3 Resiko Penduduk Menjadi Korban Tindak Kejahatan  
(Crime Rate) di Provinsi Banten, 2019**



Sumber : Polres Kab/Kota dan Polda Banten

## BAB IV. INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI)

### 4.1 Konsep Definisi

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja, namun juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua *stakeholder*, tidak hanya pemerintah.

## Komponen Penghitungan IDI 2009 – 2019

Aspek	Variabel	Indikator
<b>1. Kebebasan Sipil</b>	1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	2 indikator
	2. Kebebasan Berpendapat	2 indikator
	3. Kebebasan Berkeyakinan	3 indikator
	4. Kebebasan dari Diskriminasi	3 indikator
<b>2. Hak-Hak Politik</b>	5. Hak Memilih dan Dipilih	5 indikator
	6. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan	2 indikator
<b>3. Lembaga Demokrasi</b>	7. Pemilu yang Bebas dan Adil	2 indikator
	8. Peran DPRD	3 indikator
	9. Peran Partai Politik	2 indikator
	10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	2 indikator
	11. Peradilan yang Independen	2 indikator

Sumber : BPS Provinsi Banten

Pengumpulan data IDI menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif sebagai tahapan yang saling melengkapi. Pada tahap pertama, data kuantitatif dikumpulkan dari koding surat kabar dan dokumen tertulis, seperti perda atau peraturan dan surat keputusan kepala daerah, yang sesuai dengan indikator-indikator IDI. Temuan-temuan tersebut kemudian diverifikasi dan dielaborasi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) sebagai tahap pengumpulan data kedua, sekaligus menggali kasus-kasus yang tidak tertangkap di koding surat kabar/dokumen. Pada tahap ketiga data yang telah terkumpul tersebut diverifikasi melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang kompeten memberikan informasi tentang suatu kasus. Semua tahapan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi, diolah di BPS RI, dan diverifikasi oleh Dewan Ahli beserta mitra kerja lain pada semua tahapannya.

Penghitungan IDI melalui tiga tahapan proses yakni pertama, menghitung skor akhir untuk setiap indikator; kedua, menghitung indeks provinsi; dan ketiga, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkis terkait satu dengan yang lain. Skor masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 variabel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi, dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional.

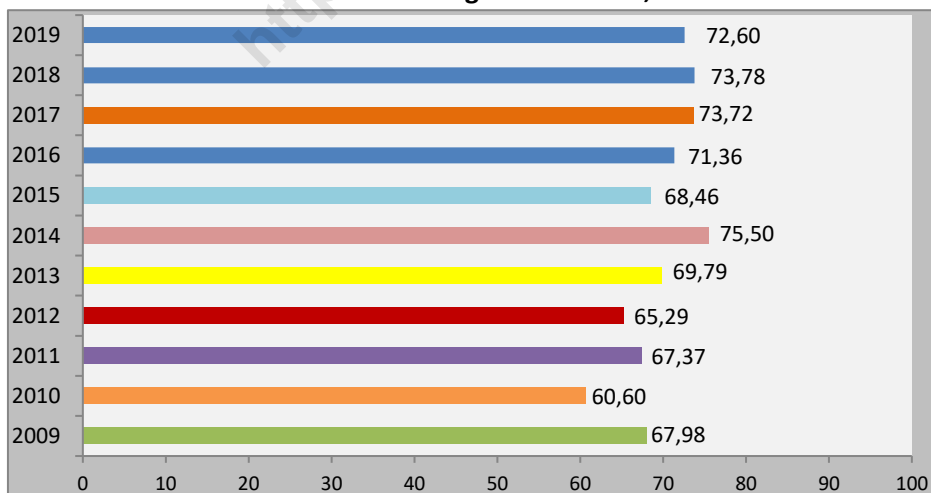
Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoritis dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritis dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).

## 4.2 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten 2019

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Banten tahun 2019 mencapai angka 72,60 dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 yang capaiannya sebesar 73,78. Meskipun mengalami penurunan, namun tingkat demokrasi di Banten masih termasuk dalam kategori “sedang”.

Capaian IDI Banten dari tahun 2009 hingga 2018 mengalami fluktuasi. Pada awal mula dihitung tahun 2009, capaian IDI Banten hanya sebesar 67,98. Angka ini terus mengalami perubahan hingga mencapai momen tertingginya pada tahun 2014 sebesar 75,50; walaupun kemudian turun drastis menjadi 68,46 di tahun 2015 dan meningkat kembali pada tahun 2018 sebesar 73,78, kemudian kembali turun pada tahun 2019 menjadi 72,60.

**Gambar 4. 1 Perkembangan IDI Banten, 2009-2019**

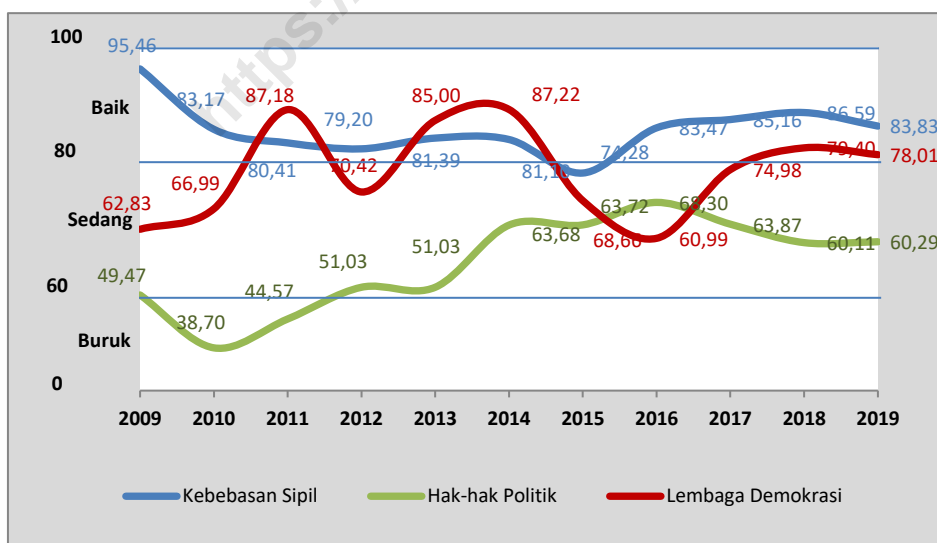


Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Banten No. 46/08/36/Th. XIV, 6 Agustus 2020

Fluktuasi angka IDI adalah cerminan situasi dinamika demokrasi di Banten. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian (*evidence-based*) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.

Nilai IDI Banten 2019 sebesar 72,60 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil yang bernilai 83,83; aspek Hak-Hak Politik yang bernilai 60,29; dan aspek Lembaga Demokrasi yang bernilai 78,01. Penurunan nilai IDI Banten 2019 disumbang oleh turunnya nilai dua aspek penyusun IDI yaitu aspek Kebebasan Sipil dan Lembaga Demokrasi.

**Gambar 4.2 Perkembangan Indeks Aspek IDI Banten, 2009-2019**



Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Banten No. 46/08/36/Th. XIV, 6 Agustus 2020

Nilai aspek Kebebasan Sipil turun sebesar 2,76 poin dari 86,59 menjadi 83,83. Capaian aspek ini dari tahun ke tahun relatif stabil dan masih menjadi yang tertinggi di antara dua aspek lainnya. Aspek Lembaga Demokrasi pada tahun 2019 sebesar 78,01 menurun 1,38 poin dibanding tahun sebelumnya. Perkembangan aspek Lembaga Demokrasi selama kurun waktu penyusunan IDI Banten cukup menggembirakan dengan kecenderungan trend positif. Sementara itu, aspek Hak-Hak politik menjadi aspek yang mengalami kenaikan sebesar 0,18 poin dan menempatkannya menjadi aspek dengan nilai terendah.

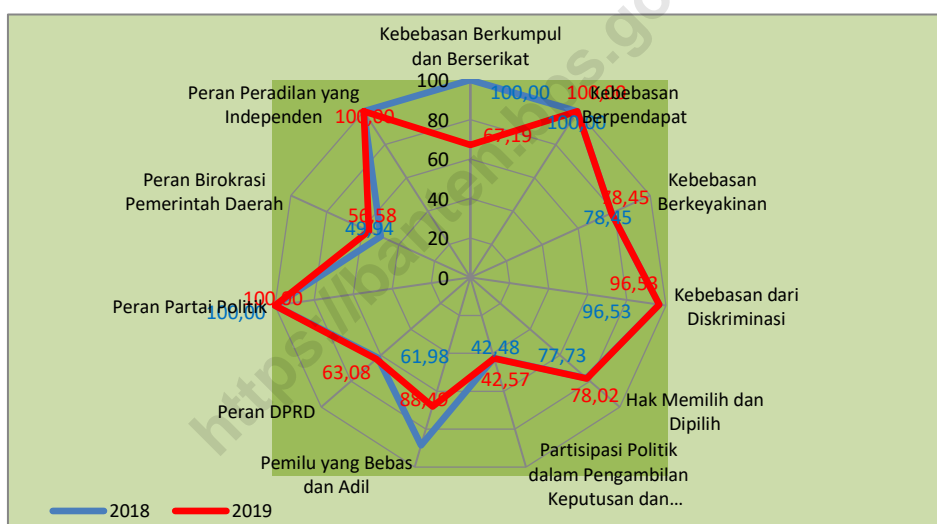
Seperti halnya di tahun 2018, pada tahun 2019 tidak ada lagi aspek yang berkategori “buruk”. Aspek Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi tetap pada kategori “sedang”, sementara aspek Kebebasan Sipil masih dalam kategori yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu kategori “baik”.

Pada tahun 2019 terdapat empat variabel penyusun IDI Banten yang nilainya naik, lima variabel bernilai tetap dan dua variabel lainnya nilainya turun. Dua variabel tersebut mengalami penurunan yang cukup drastis. Variabel Kebebasan Berserikat dan Berkumpul menurun paling tinggi yaitu sebesar 32,81 poin, dari 100,00 pada 2018 menjadi 67,19 pada 2019. Penurunan yang kedua terjadi pada variabel Pemilu yang Bebas dan Adil yang turun 20,45 poin dibanding tahun sebelumnya.

Di sisi lain, empat variabel penyusun IDI mengalami peningkatan. Peningkatan nilai variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah sebesar 6,65 poin, variabel Peran DPRD meningkat sebesar 1,10 poin dan

variabel Hak memilih dan Dipilih sebesar 0,29 poin. Sementara nilai variabel Peran Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan hanya naik sebesar 0,09 poin (dari 42,48 menjadi 42,57). Lima variabel lainnya yaitu variabel Kebebasan Berpendapat, variabel Kebebasan Berkeyakinan, variabel Kebebasan dari Diskriminasi, variabel Peran Partai Politik, dan variabel Peran Peradilan yang Independen tidak ada perubahan, nilainya sama dengan tahun sebelumnya.

**Gambar 4.3 Perkembangan Indeks Variabel IDI Banten, 2017-2019**



Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Banten No. 46/08/36/Th. XIV, 6 Agustus 2020

Jika dilihat dari perkembangan skor indikator IDI Banten 2019, dari 28 indikator terdapat 19 indikator yang berkinerja “baik” (memiliki skor di atas 80), 4 indikator berkinerja “sedang” dan sebanyak 5 indikator masih mempunyai kinerja yang buruk (skor di bawah 60). Kelima indikator berkinerja buruk ini memerlukan perhatian khusus agar nilainya membaik. Indikator tersebut adalah indikator 15



(persentase anggota perempuan DPRD provinsi), indikator 16 (demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan), indikator 18 (kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu), Indikator 22 (rekomendasi DPRD kepada eksekutif), dan indikator 26 (upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah).

<https://banten.bps.go.id>

**LAMPIRAN**

<https://bantenbps.go.id>



**Tabel 2.1 Jumlah Anggota DPRD Provinsi Banten menurut Asal Partai dan Jenis Kelamin Tahun 2019**

No	Asal Partai Politik	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1 .	PDIP	9	4	13
2 .	GOLKAR	10	1	11
3 .	GERINDRA	14	2	16
4 .	DEMOKRAT	9	-	9
5 .	PKS	8	3	11
6 .	PPP	3	2	5
7 .	PKB	7	-	7
8 .	HANURA	1	-	1
9 .	NASDEM	3	1	4
10 .	PAN	5	1	6
11.	PSI	-	1	1
12.	BERKARYA	1	-	1
<b>Jumlah</b>		<b>70</b>	<b>15</b>	<b>85</b>

*Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Banten*

**Tabel 2.2 Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang menurut Asal Partai dan Jenis Kelamin Tahun 2019**

No	Asal Partai Politik	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	GOLKAR	7	-	7
2.	GERINDRA	6	1	7
3.	DEMOKRAT	5	1	6
4.	PDIP	5	-	5
5.	PPP	4	1	5
6.	PKS	6	-	6
7.	PKB	4	2	6
8.	NASDEM/PERINDO	3	1	4
9.	PAN/PBB	4	-	4
<b>Jumlah</b>		<b>44</b>	<b>6</b>	<b>50</b>

*Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Pandeglang*

**Tabel 2.3 Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Lebak menurut Asal Partai dan Jenis Kelamin Tahun 2019**

No	Asal Partai Politik	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PDIP	5	2	7
2.	GOLKAR	6	-	6
3.	DEMOKRAT	7	-	7
4.	NASDEM	3	2	5
5.	PKS	5	-	5
6.	PKB	6	-	6
7.	GERINDRA	8	1	9
8.	PPP	4	-	4
9.	PERINDO	1	-	1
<b>Jumlah</b>		<b>45</b>	<b>5</b>	<b>50</b>

*Sumber: Sekretariat DPRD Lebak*

**Tabel 2.4 Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Tangerang menurut Asal Partai dan Jenis Kelamin Tahun 2019**

No	Asal Partai Politik	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	GOLKAR	5	1	6
2.	PDIP	6	2	8
3.	DEMOKRAT	4	2	6
4.	PPP	6	-	6
5.	GERINDRA	7	-	7
6.	PKB	4	-	4
7.	PAN	3	1	4
8.	NASDEM	1	1	2
9.	HANURA	1	-	1
10.	PKS	6	-	6
<b>Jumlah</b>		<b>43</b>	<b>7</b>	<b>50</b>

*Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang*

**Tabel 2.5 Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Serang menurut Asal Partai dan Jenis Kelamin Tahun 2019**

No	Asal Partai Politik	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	GOLKAR	6	3	9
2.	DEMOKRAT	4	1	5
3.	PDIP	4	-	4
4.	GERINDRA	7	1	8
5.	PPP	2	-	2
6.	PAN	4	-	4
7.	NASDEM	2	-	2
8.	PKS	5	-	5
9.	PKB	4	-	4
10.	HANURA	1	-	1
11.	PBB	1	1	2
12.	BERKARYA	4	-	4
<b>Jumlah</b>		<b>44</b>	<b>6</b>	<b>50</b>

*Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Serang*



**Tabel 2.6 Jumlah Anggota DPRD Kota Tangerang menurut Asal Partai dan Jenis Kelamin Tahun 2019**

No	Asal Partai Politik	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PDIP	7	3	10
2.	GOLKAR	5	1	6
3.	GERINDRA	6	0	6
4.	PPP	4	1	5
5.	DEMOKRAT	3	2	5
6.	PKS	3	1	4
7.	PKB	5	0	5
8.	PAN	3	1	4
9.	HANURA	2	1	3
10.	NASDEM	2	0	2
<b>Jumlah</b>		<b>40</b>	<b>10</b>	<b>50</b>

*Sumber: Sekretariat DPRD Kota Tangerang*

**Tabel 2.7 Jumlah Anggota DPRD Kota Cilegon menurut Asal Partai dan Jenis Kelamin Tahun 2019**

No	Asal Partai Politik	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	GOLKAR	10	-	10
2.	PPP	2	-	2
3.	PDIP	2	2	4
4.	NASDEM	3	-	3
5.	PKS	2	2	4
6.	GERINDRA	6	-	6
7.	PAN	4	-	4
8.	PKB	1	-	1
9.	BERKARYA	4	-	4
<b>Jumlah</b>		<b>34</b>	<b>4</b>	<b>38</b>

*Sumber: Sekretariat DPRD Kota Cilegon*

**Tabel 2.8 Jumlah Anggota DPRD Kota Serang menurut Asal Partai dan Jenis Kelamin Tahun 2019**

No	Asal Partai Politik	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	GOLKAR	5	2	7
2.	PDIP	6	-	6
3.	GERINDRA	4	1	5
4.	DEMOKRAT	5	-	5
5.	PKB	4	2	6
6.	NASDEM	3	1	4
7.	PAN	3	-	3
8.	HANURA	1	2	3
9.	PKS	3	-	3
10.	PPP	3	-	3
<b>Jumlah</b>		<b>37</b>	<b>8</b>	<b>45</b>

*Sumber: Sekretariat DPRD Kota Serang*

**Tabel 2.9 Jumlah Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan menurut Asal Partai dan Jenis Kelamin Tahun 2019**

No	Asal Partai Politik	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	GOLKAR	8	2	10
2.	PDIP	5	3	8
3.	GERINDRA	5	3	8
4.	HANURA	1	-	1
5.	PKS	4	4	8
6.	DEMOKRAT	3	2	5
7.	PAN	2	-	2
8.	PKB	3	1	4
9.	PSI	3	1	4
<b>Jumlah</b>		<b>34</b>	<b>16</b>	<b>50</b>

*Sumber: Sekretariat DPRD Kota Tangerang Selatan*

**Tabel 2.10 Jumlah Produk Hukum yang Dihasilkan DPRD Tahun 2019**

Kab/Kota	Jenis Produk Hukum	
	Peraturan daerah	Inisiasi DPRD
(1)	(2)	(3)
01 Pandeglang	-	-
02 Lebak	3	-
03 Tangerang	11	3
04 Serang	7	5
71 Kota Tangerang	9	1
72 Kota Cilegon	9	2
73 Kota Serang	5	5
74 Kota Tangerang Selatan	16	3
<b>Provinsi Banten</b>	<b>15</b>	<b>7</b>

*Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi*

**Tabel 2.11 Jumlah Organisasi Massa yang Terdaftar Tahun 2019**

Kab/Kota	Jumlah Ormas/LSM	
	Mendaftar Tahun Ini	Total Terdaftar
(1)	(2)	(3)
01 Pandeglang	9	237
02 Lebak	80	290
03 Tangerang	31	206
04 Serang	15	96
71 Kota Tangerang	48	126
72 Kota Cilegon	15	158
73 Kota Serang	18	126
74 Kota Tangerang Selatan	180	180
<b>Provinsi Banten</b>	<b>31</b>	<b>31</b>

*Sumber: Badan Kesbangpol Kabupaten/Kota dan Provinsi*

**Tabel 3.1 Jumlah Kantor Polisi menurut Kabupaten/Kota dan Wilayah Kerja di Provinsi Banten Tahun 2019**

Kabupaten/Kota		Polda	Polres/ Polresta	Polsek/ Polsekta	Pos Polisi
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
01	Pandeglang	0	1	24	0
02	Lebak	0	1	23	2
03	Tangerang	0	1	10	14
04	Serang	0	1	12	1
71	Kota Tangerang	0	1	11	13
72	Kota Cilegon	0	1	13	8
73	Kota Serang	0	1	12	9
74	Kota Tangerang Selatan	0	1	9	24
<b>Polda Banten</b>		<b>1</b>	<b>8</b>	<b>114</b>	<b>71</b>

*Sumber : Polres Kab/Kota dan Polda Banten*

**Tabel 3.2 Jumlah Polisi dan Rasio Penduduk per Polisi  
di Provinsi Banten Tahun 2019**

Kabupaten/Kota	Jumlah Polisi			Rasio Penduduk per Polisi
	Laki-laki	Perempuan	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Pandeglang	797	40	837	1 448
02 Lebak	821	43	864	1 508
03 Tangerang	907	50	957	3 972
04 Serang	702	43	745	2 025
71 Kota Tangerang	1 402	93	1 495	1 492
72 Kota Cilegon	728	47	775	564
73 Kota Serang	667	49	716	962
74 Kota Tangerang Selatan	1 118	53	1 171	1 493
<b>Polda Banten</b>	<b>7 142</b>	<b>418</b>	<b>7 560</b>	<b>1 710</b>

*Sumber : Polres Kab/Kota dan Polda Banten*



**Tabel 3.3 Jumlah Tindak Pidana yang Dilaporkan (*Crime Total*) dan Tindak Pidana yang Diselesaikan (*Crime Cleared*) di Provinsi Banten Tahun 2019**

Kabupaten/Kota		Tindak Pidana yang Dilaporkan ( <i>Crime Total</i> )	Tindak Pidana yang Diselesaikan ( <i>Crime Cleared</i> )
(1)		(2)	(3)
01	Pandeglang	339	204
02	Lebak	306	185
03	Tangerang	1 169	808
04	Serang	213	77
71	Kota Tangerang	680	572
72	Kota Cilegon	589	359
73	Kota Serang	658	350
74	Kota Tangerang Selatan	1 501	1 316
<b>Polda Banten</b>		<b>5 455</b>	<b>3 871</b>

Sumber : Polres Kab/Kota dan Polda Banten

**Tabel 3.4 Persentase Penyelesaian Tindak Pidana (*Clearance Rate*) di Provinsi Banten Tahun 2019**

<b>Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Penyelesaian Tindak Pidana (<i>Clearance Rate</i>)</b>
(1)		(2)
01	Pandeglang	60,18
02	Lebak	60,46
03	Tangerang	69,12
04	Serang	36,15
71	Kota Tangerang	84,12
72	Kota Cilegon	60,95
73	Kota Serang	53,19
74	Kota Tangerang Selatan	87,67
<b>Polda Banten</b>		<b>70,96</b>

*Sumber : Polres Kab/Kota dan Polda Banten*

**Tabel 3.5 Jumlah Pengelompokan Jenis Tindak Pidana terhadap Fisik Manusia di Provinsi Banten Tahun 2019**

Kabupaten/Kota	Jenis Tindak Pidana				
	Pembunuhan	Perkosaan	Penganiayaan Ringan	Penganiayaan Berat	Penculikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Pandeglang	1	1	-	36	-
02 Lebak	4	-	8	20	-
03 Tangerang	-	3	38	33	-
04 Serang	1	-	15	-	-
71 Kota Tangerang	7	-	16	30	-
72 Kota Cilegon	-	-	9	14	-
73 Kota Serang	4	2	78	50	2
74 Kota Tangerang Selatan	1	9	-	60	-
Polda Banten	18	15	164	243	2

Sumber : Polres Kab/Kota dan Polda Banten

**Tabel 3.6 Pengelompokan Jenis Tindak Pidana terhadap Hak Milik (Barang) di Provinsi Banten Tahun 2019**

Kab/Kota	Jenis Tindak Pidana									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
01 Pandeglang	-	2	60	10	4	-	35	-	112	3
02 Lebak	-	1	61	7	8	-	21	-	78	3
03 Tangerang	-	5	87	25	24	-	207	-	104	93
04 Serang	-	2	10	14	6	-	56	-	-	12
71 Kota Tangerang	1	-	60	34	15	1	34	-	106	25
72 Kota Cilegon	-	-	82	21	12	-	31	-	175	33
73 Kota Serang	-	4	112	27	20	-	75	-	146	43
74 Kota Tangerang Selatan	-	5	4	51	-	-	88	-	48	68
Polda Banten	1	19	476	189	89	1	547	0	769	280

Sumber : Polres Kab/Kota dan Polda Banten

Keterangan:

- |                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1 Pembakaran dengan sengaja        | 6 Pencurian dalam keluarga     |
| 2 Pengrusakan/ Penghancuran barang | 7 Penipuan/ Perbuatan curang   |
| 3 Pencurian dengan pemberatan      | 8 Penadahan                    |
| 4 Pencurian ringan                 | 9 Pencurian kendaraan bermotor |
| 5 Pencurian dengan kekerasan       | 10 Penggelapan                 |

**Tabel 3.7 Jenis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Banten Tahun 2019**

Kabupaten/Kota		Narkotika	Obat Keras
(1)		(2)	(3)
01	Pandeglang	-	-
02	Lebak	41	-
03	Tangerang	335	-
04	Serang	68	-
71	Kota Tangerang	-	-
72	Kota Cilegon	96	-
73	Kota Serang	-	-
74	Kota Tangerang Selatan	58	-
Provinsi Banten		598	-

Sumber : Polres Kab/Kota dan Polda Banten

**Tabel 4.1 Perkembangan Indeks Variabel IDI Banten, 2018-2019**

No	Nama Variabel	2018	2019	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	100,00	67,19	-32,81
2	Kebebasan Berpendapat	100,00	100,00	0
3	Kebebasan Berkeyakinan	78,45	78,45	0
4	Kebebasan dari Diskriminasi	96,53	96,53	0
5	Hak Memilih dan Dipilih	77,73	78,02	0,29
6	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	42,48	42,57	0,09
7	Pemilu yang Bebas dan Adil	88,49	68,04	-20,45
8	Peran DPRD	61,98	63,08	1,10
9	Peran Partai Politik	100,00	100,00	0
10	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	49,94	56,58	6,65
11	Peran Peradilan yang Independen	100,00	100,00	0

Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Banten No. 46/08/36/Th. XIV, 6 Agustus 2020

**Tabel 4.2 Perkembangan Skor Indikator IDI Banten, 2018-2019**

No	Nama Indikator	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
	<b>Kebebasan Sipil</b>	<b>86,59</b>	<b>83,83</b>
1	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	62,50
2	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00	100,00
3	Ancaman /penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	100,00	100,00
4	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	100,00	100,00
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	69,57	69,57
6	Tindakan/ Pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama	100,00	100,00
7	Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama	100,00	100,00
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok	100,00	100,00
9	Tindakan/ Pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok	87,50	87,50
10	Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, kelompok	100,00	100,00
	<b>Hak-Hak Politik</b>	<b>60,11</b>	<b>60,29</b>
11	Hak memilih atau dipilih terhambat	99,36	96,15
12	Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih	60,00	95,60
13	Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)	77,12	70,94
14	Voters turnout	70,83	83,23
15	Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Propinsi	66,67	58,83
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	0,00	0,00
17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	84,95	85,14

**Tabel 4.2 Perkembangan Skor Indikator IDI Banten, 2018-2019  
(Lanjutan)**

No	Nama Indikator	2018	2019
	<b><i>Lembaga Demokrasi</i></b>	<b>79,40</b>	<b>78,01</b>
18	Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	90,91	50,00
19	Kecurangan dalam penghitungan suara	86,08	86,08
20	Alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan	62,36	72,20
21	Perda yang merupakan inisiatif DPRD	100,00	90,90
22	Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif	28,57	7,14
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu	100,00	100,00
24	Persentase perempuan pengurus partai politik	100,00	100,00
25	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	89,47	84,21
26	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	16,66	33,33
27	Keputusan hakim yang kontroversial	100,00	100,00
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	100,00	100,00

Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Banten No. 46/08/36/Th. XIV, 6 Agustus 2020



**Tabel 4.3. Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Berdasarkan Aspek dan Provinsi, 2018-2019**

Provinsi	IDI 2018				IDI 2019			
	IDI	Aspek Kebebasan Sipil	Aspek Hak-hak Politik	Aspek Lembaga Demokrasi	IDI	Aspek Kebebasan Sipil	Aspek Hak-hak Politik	Aspek Lembaga Demokrasi
Aceh	79,97	96,27	68,09	77,67	78,00	93,28	65,22	79,08
Sumatera Utara	64,33	76,54	62,61	51,69	67,65	72,54	61,59	71,12
Sumatera Barat	67,06	55,32	62,84	88,52	67,69	56,58	61,06	92,21
Riau	77,59	86,88	62,77	89,47	75,21	85,15	61,68	84,19
Jambi	68,71	72,88	62,76	72,92	69,76	76,67	64,63	69,21
Sumatera Selatan	77,14	83,13	73,12	76,01	78,96	80,54	81,95	72,23
Bengkulu	70,71	78,77	62,18	74,13	78,79	93,98	73,17	68,63
Lampung	68,67	77,29	59,53	72,35	72,56	78,46	63,70	79,22
Kep. Bangka Belitung	73,43	80,95	73,56	63,76	76,75	84,12	71,71	75,48
Kepulauan Riau	79,19	91,05	77,54	66,90	81,64	92,66	78,30	73,10
DKI Jakarta	85,08	95,09	75,43	87,82	88,29	91,01	83,86	91,89
Jawa Barat	65,50	74,90	64,78	54,80	69,09	65,16	71,15	70,75
Jawa Tengah	72,17	76,21	66,92	75,42	77,22	78,43	67,91	90,50
D.I.Yogyakarta	80,82	90,60	75,07	77,66	80,67	92,90	72,51	78,25
Jawa Timur	72,86	77,21	67,45	75,97	77,68	72,14	80,25	80,55
Banten	73,78	86,59	60,11	79,40	72,60	83,83	60,29	78,01
Bali	82,37	94,72	68,08	89,55	81,38	90,60	68,38	90,42
Nusa Tenggara Barat	73,63	78,28	62,08	86,11	76,64	78,36	66,14	91,16
Nusa Tenggara Timur	82,32	94,00	71,85	84,28	81,02	93,97	78,58	68,62
Kalimantan Barat	76,14	93,87	64,01	73,08	77,66	92,59	71,45	68,74
Kalimantan Tengah	71,27	90,09	50,46	80,65	81,16	86,31	78,24	79,32
Kalimantan Selatan	79,92	69,26	83,03	88,37	79,47	68,01	86,52	82,67
Kalimantan Timur	73,88	90,99	61,38	72,22	77,67	88,50	66,27	82,17
Kalimantan Utara	81,07	97,36	75,80	68,95	83,45	96,60	74,92	80,46
Sulawesi Utara	77,77	88,90	69,53	76,86	77,08	95,19	63,54	75,82
Sulawesi Tengah	75,29	91,90	54,94	86,72	77,27	96,19	53,21	91,68
Sulawesi Selatan	70,88	72,44	64,05	79,75	70,58	68,32	65,61	81,34
Sulawesi Tenggara	74,32	79,77	67,59	78,16	65,21	80,31	52,18	66,90
Gorontalo	72,59	79,33	64,95	76,26	76,29	75,17	76,93	76,70
Sulawesi Barat	71,46	87,41	55,05	77,45	77,42	81,58	70,22	83,60
Maluku	75,51	81,38	72,86	72,32	68,22	87,06	55,62	64,55
Maluku Utara	72,10	78,94	62,39	78,92	69,89	85,61	64,86	58,11
Papua Barat	58,29	82,11	40,11	57,21	57,62	70,35	50,31	53,23
Papua	62,20	84,36	47,90	57,05	65,25	93,08	51,16	52,61
INDONESIA	72,39	78,46	65,79	75,25	74,92	77,20	70,71	78,73

Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Banten No. 46/08/36/Th. XIV, 6 Agustus 2020

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI BANTEN**

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Kav. H1-2  
Jl. Syekh Nawawi Al-Batani, Kota Serang - Banten 42171  
Telepon (0254) 267027, Faks. (0254) 267026